

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkup pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Dengan adanya tujuan pembangunan tersebut pemerintah berusaha menyeimbangkan antara bidang pertanian dan industri. Bangsa Indonesia yang sebagian besar atau hampir 70% penduduknya hidup di daerah pedesaan dan mereka memproduksi kira-kira 40% dari Produk Domestik Bruto Nasional.

Dari sini jelaslah bahwa sektor pedesaan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan produksi. Kegiatan-kegiatan ini umumnya berupa usaha pertanian kecil pangan dan sebagian kecil kegiatan pengolahan hasil pertanian, pedagang kecil serta kegiatan industri kecil/rumah tangga serta kerajinan. Semua kegiatan ini melibatkan kegiatan perkreditan untuk produksi disamping itu juga terdapat banyak kegiatan perkreditan untuk tujuan konsumsi, karena tingkat pendapatan petani/penduduk di daerah pedesaan yang rendah.

Dengan munculnya para pengusaha kecil tersebut seharusnya mampu memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia, namun pada kenyataannya para pengusaha kecil belum bisa memberikan kontribusinya. Hal ini terjadi karena para pengusaha kecil masih menghadapi berbagai permasalahan.

Sejak awal pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun terakhir Indonesia telah berhasil mengejar pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8% pertahun. Tingkat pertumbuhan yang tinggi ini memang harus kita sadari tidak terlepas dari peran Usaha Besar (*konglomerat*) yang menguasai usaha dari hulu kehilir yang jumlahnya tidak kurang dari 300 usaha. Usaha Besar (UB) ini telah berperan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni tidak kurang dari 61% menurut data BPS tahun 1996.

Namun keberhasilan yang dicapai tidak lebih baik dibandingkan dengan kegagalan atau dampak-dampak negatif yang ditinggalkan. Terjadinya sistem ekonomi konglomerasi (SEK) banyak dinodai oleh praktek-praktek bisnis yang tidak wajar seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni, selain itu SEK juga tidak mengakar pada rakyat dan makin memperlebar jurang kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, antar wilayah dan antar sektor. Hal ini makin terasa setelah terjadinya krisis moneter yang berawal pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis kepercayaan kepada pemerintahan.

Di pihak lain krisis ekonomi memberatkan para pengusaha dan masyarakat, tetapi di pihak lain menjadi tantangan dan peluang, seperti yang telah disebutkan dalam suatu penelitian Badan Litbang Koperasi dan

Pengusaha Kecil (PK) yang disurvei, 64% masih dapat bertahan, 31% mengurangi kegiatan usaha, 4% menghentikan usaha dan yang 1% mampu berkembang. Artinya meskipun krisis ekonomi terjadi para pengusaha kecil mampu mempertahankan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomian ini.

Bertitik tolak dari gambaran krisis ekonomi tersebut membuktikan bahwa Sistem Ekonomi Konglomerasi (SEK) sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Untuk itu pada Era Reformasi ini paradigma pembangunan perlu diubah. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya para pengusaha kecil hingga mampu berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta memperkuat struktur perekonomian nasional merupakan tantangan besar yang harus diperjuangkan, diantara salah satu tantangan yang menjadi kendala para pengusaha kecil untuk berkembang adalah lemahnya akses pemupukan modal.

Menurut Mubyarto dan Edi Suandi Hamid (1993:3) menjelaskan bahwa “salah satu ciri yang melekat dalam masyarakat pedesaan Indonesia adalah permodalan yang lemah sedangkan permodalan merupakan unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan itu sendiri”. Berarti kekurangan modal sangat membatasi ruang gerak usaha yang ditujukan untuk peningkatan produktivitasnya.

Peran serta usaha kecil perlu dioptimalkan dengan mempelajari secara mendalam permasalahan utama pengembangan usaha mereka secara umum. Salah satu faktor penyebab permasalahan tersebut adalah kesulitan pengusaha kecil untuk mendapatkan tambahan modal dalam menjalankan usahanya.

Sejak dahulu di daerah pedesaan ada banyak pihak yang telah beroperasi menawarkan permodalan yang bisa diperoleh dengan mudah, seperti dari para pelepas uang liar (renternir) dan pengijon. Pinjaman dari kredit perorangan ini memang memiliki beberapa kemudahan seperti pelayanannya cepat, uang yang dibutuhkan bisa segera diterima tanpa prosedur yang berbelit-belit, tetapi bunga yang dibebankan sangat tinggi. Pinjaman dari kredit perorangan ini hanya mengatasi kesulitan dana untuk sementara waktu, sebab dengan meminjam dari kredit perorangan kebanyakan penduduk pedesaan justru terjerat kesulitan baru.

Mengingat pentingnya bantuan permodalan bagi masyarakat pedesaan, dan belum berhasilnya kebanyakan lembaga kredit formal yang ada dalam mengatasi masalah tersebut, maka perlu dipikirkan lembaga dan pola kredit yang bisa efektif untuk dimasyaraktkan di daerah pedesaan.

Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan derajat kehidupan masyarakat golongan ekonomi lemah dengan berbagai program atau kebijaksanaan ekonomi agar mereka tidak tertinggal dan terjerat pada para pelepas uang liar (renternir) dan pengijon. Adapun kebijaksanaan yang dimaksud adalah suatu kebijaksanaan ekonomi yang bersifat mendorong potensi golongan ekonomi yang ingin meningkatkan usahanya dengan

memberikan bantuan modal yang berskala kecil yang diharapkan dengan adanya bantuan tersebut akan dapat meningkatkan pendapatannya.

Kebijaksanaan pemerintah tidak hanya terbatas pada penciptaan lembaga kredit yang terorganisir, namun juga berusaha menghilangkan beberapa sistem kredit pedesaan yang tidak resmi, terutama pemberian pinjaman uang yang dikenal sebagai ijon, suatu sistem yang bertahan selama beberapa dasawarsa dan hingga kini masih beroperasi di banyak daerah meskipun pemerintah telah berupaya membasminya.

“Ijon” berasal dari kata ‘Ijo’ (hijau), yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam transaksi. Dalam pengertian yang berbeda “ijon” mempunyai sifat pembayaran dimuka untuk panen hasil bumi, sifat pemberian pinjaman uang dengan tingkat bunga sangat tinggi, dan sifat menggadaikan.

Masyarakat pedesaan yang meliputi petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, pegawai pemerintah dan pengrajin memerlukan uang kas untuk berbagai tujuan, misalnya untuk persediaan menanam selama belum datang musim panen (musim paceklik), untuk pemeliharaan tanaman bahan pokok dan tanaman perdagangan, untuk penggudangan, pemasaran atau biaya pengangkutan barang, untuk menyekolahkan anaknya atau untuk keperluan lainnya, sedangkan untuk memisahkan tujuan-tujuan produksi, tujuan-tujuan konsumsi tidaklah selalu mudah, terutama bagi mereka yang hidup mendekati tingkat subsisten (batas hidup).

Untuk tujuan semacam itu masyarakat pedesaan memerlukan sumber pembiayaan yang mudah, murah, cepat dan tepat, tanpa prosedur yang berbelit-belit serta tidak menyulitkan, seperti tanda tangan, surat-surat atau sertifikat, tingkat bunga harus cukup rendah, uang tersedia dan siap diambil bila diperlukan, tidak harus menunggu beberapa minggu kemudian, dan jumlahnya pun harus sama dengan yang diperlukan, persyaratan-persyaratan tersebut tidaklah dirumuskan oleh masyarakat pedesaan sendiri, namun dengan persyaratan-persyaratan tersebut muncul perbedaan-perbedaan antara sistem ijon dan kredit yang disponsori oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membentuk lembaga keuangan yang salah satu sarannya adalah membantu menyediakan kredit bagi para pengusaha kecil, yaitu dengan jalan mendirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di daerah pedesaan. Hal ini sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil yang diwujudkan dalam bentuk kredit kepada para pengusaha kecil dengan syarat ringan dan mudah, dengan adanya bantuan modal dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pengusaha kecil.

BPR-BKK adalah salah satu sumber kredit terpenting bagi para pengusaha kecil, dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat sebagai bank untuk daerah-daerah pedesaan atau pengusaha-pengusaha gurem yang sifat usahanya melayani sektor informal di kota-kota. Sesuai dengan kemampuan permodalan yang lemah dari masyarakat, bentuk Bank Perkreditan Rakyat merupakan bentuk yang tepat untuk didirikan di Indonesia sekaligus sebagai lembaga

keuangan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Menurut Seri Perundang Undangan Perbankan Indonesia 2004 (2004: 228) menjelaskan bahwa menurut jenisnya bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan BPR antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka atau dalam bentuk lainnya dan memberikan kredit.

Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) adalah Bank Perkreditan Rakyat yang menyalurkan kredit usaha kepada para petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil dan pensiunan. Mengingat kredit yang telah diberikan BPR-BKK jumlahnya yang relatif kecil, sehingga jumlah tersebut memungkinkan bagi masyarakat pedesaan untuk menjangkaunya. Masyarakat pedesaan yang mayoritas hidup mendekati tingkat subsisten (batas hidup) membutuhkan dana yang akan digunakan baik untuk tujuan konsumsi maupun produksi.

Kecilnya jumlah kredit yang diminta oleh masyarakat pedesaan tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh Bank Umum lainnya. Agar tidak terjadi kesenjangan baik golongan ekonomi lemah maupun golongan ekonomi besar dalam pemberian kredit, maka tidak terlepas dari peranan pemerintah. Peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mendirikan

BPR-BKK sebagai lembaga perkreditan yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan agar mereka tidak jatuh ketangan para pelepas uang liar (renternir) dan pengijon.

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Baban Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan Undang-Undang Perbankan Indonesia Tahun 2004.

Bantuan kredit dari BPR-BKK diberikan bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan dan yang bermaksud ingin mengembangkan usahanya dan yang berkemauan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Melihat sasaran dari penyaluran kredit ini, memang sulit diharapkan adanya jaminan material atas pinjaman nasabah tersebut, oleh karena itu jaminan bersifat material tidak menjadi persyaratan bagi calon nasabah BKK. Karena calon nasabah akan sangat kesulitan untuk memanfaatkan kredit yang disediakan oleh BPR-BKK jika persyaratannya sulit/memberatkan mereka.

Latar belakang didirikannya BPR-BKK bukanlah untuk pengembangan bank, melainkan untuk pembangunan desa, untuk menunjang pembangunan desa itu BPR-BKK bertindak untuk melancarkan penyediaan



sarana produksi, khususnya permodalan bagi golongan ekonomi lemah di pedesaan yang sangat membutuhkan pinjaman modal tersebut.

Pinjaman (nasabah) dari BPR-BKK tidak diminta untuk menyediakan jaminan yang bersifat material, seperti diterangkan dalam penjelasan PERDA No 11/1981 pasal 14, jaminan kredit bersifat imaterial yang berupa karakter atau sikap dari nasabah. Karakter atau sikap yang meyakinkan dijadikan pertimbangan utama untuk menilai apakah nasabah itu layak atau tidak layak diberi pinjaman, dengan pertimbangan ini diharapkan nasabah dapat menjalankan kewajibannya untuk ketentuan yang berlaku secara baik.

Secara operasional penyediaan modal agar dapat dijangkau calon nasabah dengan mudah adalah dengan mengambil jarak yang sedekat-dekatnya kepada calon nasabah, sehingga mereka tidak perlu kehilangan banyak waktu dan biaya transportasi untuk memperoleh pinjamannya. Untuk itu dalam melaksanakan operasinya BPR-BKK berusaha membuka pos-pos di desa-desa diwilayah kecamatan masing-masing. Sistem peminjaman disesuaikan dengan macam penerimaan penghasilan nasabah, dan cara pengangsuran diatur secara mudah sesuai dengan tingkat kemampuan. Dengan pelayanan yang baik, sistem pinjaman yang mudah, sederhana dan sesuai dengan jadwal pendapatan nasabah, diharapkan program perkreditan BPR-BKK dapat berjalan lancar.

Pos-pos yang didirikan di desa-desa umumnya bertempat didekat pusat kegiatan, seperti Balai Desa, pasar dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah terjadinya kontak dengan calon nasabah-nasabahnya, pos-pos

untuk masing-masing BKK tidak sama jumlahnya, tergantung dari tingkat kemajuannya atau kelasnya.

Peran BPR-BKK dalam upaya menjembatani kepentingan pengusaha kecil sangat mutlak diperlukan mengingat bahwasannya ketersediaan sumber modal yang ada sangat mungkin dijangka u oleh pengusaha kecil. Jumlah pinjaman yang relatif kecil menjadi pilihan pengusaha kecil dalam kepentingannya menambah modal. Kemampuan pengusaha kecil dalam mengakses dana perbankan didasari oleh kemampuan mereka dalam volume usahanya. Tentunya semakin besar volume usaha maka akan semakin dibutuhkan dana yang besar, sementara kemampuan pengusaha kecil masih sangat terbatas.

BPR-BKK diharapkan dapat membantu pengusaha kecil dalam mendapatkan tambahan modal yang mereka butuhkan guna mengembangkan dan memperlancar usahanya atau dengan kata lain akan dapat meningkatkan produktivitas, dengan meningkatnya produktivitas maka penghasilan para pengusaha kecil diharapkan akan semakin meningkat.

Untuk itu sangatlah mudah bagi pengusaha kecil yang mempunyai modal sendiri dan yang ingin meningkatkan kemampuannya yang lebih besar dengan memanfaatkan kebijakan dana perkreditan seperti kredit BIMAS, Kredit Candak Kulak, Kredit Usaha Kecil, serta kredit pedesaan lainnya.

Penulis merasa bahwasannya Bank Perkreditan Rakyat yang banyak beroperasi ditingkat kecamatan sangat diperlukan. BPR memberikan pinjaman yang nilainya relatif kecil dari bank-bank umum yang ada, kecilnya pinjaman

yang bisa diberikan golongan pengusaha kecil disebabkan kemampuan mereka dalam membutuhkan tambahan modal. Persyaratan yang adapun sangat disesuaikan dengan tipikal pengusaha dan lokasinya. Pedesaan setingkat kabupaten Rembang lebih banyak didominasi oleh golongan petani dan pengusaha hulu yang biasanya menyediakan atau memproduksi bahan baku dasar. Pengusaha-pengusaha ini biasanya termasuk dalam kategori kelompok usaha kecil menengah dan industri rumah tangga.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yaitu oleh Setyaningsih (2005: 24) dalam skripsinya yang berjudul analisis pengaruh pemberian kredit BPR-BKK Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa jumlah kredit yang diberikan BPR-BKK Ngargoyoso berpengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan para pedagang ekonomi lemah di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS PENGARUH BESARNYA PEMBERIAN KREDIT TERHADAP TINGKAT KEUNTUNGAN PENGUSAHA KECIL (Survey pada Nasabah PD. BPR-BKK se-Kabupaten Rembang)”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar memberikan kejelasan dan untuk memperluas pemahaman serta mempersempit ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah hanya pada:

1. Penelitian ini dilakukan pada PD.BPR-BKK se-kabupaten Rembang, yaitu semua pengusaha kecil dari berbagai bidang usaha.
2. Pinjaman kredit diperoleh nasabah minimal Rp 1.000.000,-.
3. Data yang diambil adalah kredit dan pendapatan tahun 2002 – 2006.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “Apakah besarnya pemberian kredit yang diberikan PD.BPR-BKK Kabupaten Rembang berpengaruh terhadap tingkat keuntungan para pengusaha kecil di kabupaten Rembang ?”.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pemberian kredit yang diberikan PD.BPR-BKK se-Kabupaten Rembang terhadap tingkat keuntungan para pengusaha kecil di wilayah kabupaten Rembang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan modal usaha tentunya para pengusaha kecil dalam membantu kegiatan usahanya yaitu pada PD. BPR-BKK yang ada di wilayahnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi PD. BPR-BKK dalam mengambil keputusan terutama terkait dengan masalah pemberian kredit.
- c. Dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar khususnya para pengusaha kecil di kabupaten Rembang

### **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi yang akan penulis susun, maka akan dikemukakan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan gambaran singkat tentang isi skripsi. Disini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini diuraikan tentang pengertian tingkat keuntungan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan, pengertian kredit, kredit modal kerja, pengertian pengusaha kecil, kriteria pengusaha kecil, pengertian bank, bank perkreditan rakyat, asas, fungsi dan sasaran bank perkreditan rakyat, pengaruh besarnya pemberian kredit dengan tingkat keuntungan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi pengertian metode penelitian, jenis-jenis penelitian, obyek dan subyek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, uji prasyarat analisis, dan teknik analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat gambaran umum PD. BPR-BKK, penyajian data, analisis data dan pembahasan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berupa kesimpulan dan saran-saran atau masukan mengenai suatu hal yang mungkin berguna bagi perkembangan PD. BPR-BKK dimasa yang akan datang.